

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang tidak hanya pemilihan bersifat babas dan jujur (*free and fair*), tetapi juga ditandai dengan pemisahan kekuasaan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), dan penyelenggaraan kekuasaan yang diatur oleh hukum untuk melindungi kemerdekaan berbicara, berkumpul, beragama serta hak-hak pribadi seseorang. Sehingga demokrasi suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka dan jujur, sehingga semua kelompok yang ikut pemilihan harus siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus ditaati dan dihormati. (Cangara, 2014, p. 53)

Perkembangan demokrasi di Indonesia banyak mengalami pasang surut. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, masyarakat Indonesia dengan beragam kebudayaan telah mengalami perjalanan panjang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yang diiringi dengan usaha demi mempertinggi tingkat perekonomian serta membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Disamping itu, partai-partai politik memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, baik dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan serta berbagai pelaksanaan yang berkaitan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. (Sunggono, 1992)

Sebagai wujud keikutsertaan rakyat dalam demokrasi, segenap keinginan rakyat disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dan dibentuk secara demokratis, yaitu dengan pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali. Di Indonesia lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang terdapat dalam tiga jenis yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten. Diharapkan agar wakil-wakil rakyat dapat menyuarakan aspirasi rakyat serta berpegang teguh pada amanahnya dengan sebaik-baiknya. (Marsudi, 2001)

Menurut UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal 67 dan pasal 68 menjelaskan bahwa Lembaga

Perwakilan Rakyat (DPR, DPD, DPRD) terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum serta yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Sistem kepartaian Indonesia adalah sistem multi partai berarti negara yang memiliki beberapa partai politik (lebih dari satu partai).

Menurut Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum. Tentunya dalam mewujudkan tujuan partai politik harus memiliki strategi. Menurut Karl von Clausewitz (1780-1831) merumuskan strategi merupakan suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Sedangkan Marthin-Anderson (1968) menjelaskan bahwa strategi adalah seni yang mana melibatkan kemampuan inteligensi atau pikiran untuk membanwa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal serta efisien. Tanpa strategi, tujuan partai politik sama sekali tidak akan terwujud. (Budiardjo, 2013, p. 143)

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan politik. Contohnya pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintahan, melaksakan program desentralisasi. Strategi-strategi politik tidak hanya digunakan partai dan pemerintahan saja, tetapi juga untuk organisasi non-pemerintah yang aktif dalam politik sehingga dibutuhkan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Tanpa strategi politik, perubahan jangka panjang atau cita-cita partai politik tidak akan terwujud. (Schroder, 2010, pp. 26-27) Banyak tujuan strategi di bidang politik, antara lain berlombaan untuk memperkaya diri, pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan, atau pertarungan untuk mendapatkan tujuan yang tersembunyi. Strategi selalu memiliki tujuan untuk “kemenangan”. Kemenangan akan menjadi fokus, yang tercermin dalam mandat, dalam perolehan tambahan suara, dalam kemenangan pemilu kandidat dalam memperoleh suara mayoritas pemberlakuan suatu peraturan atau kebijakan. (Schroder, 2010, p. 22)

Strategi komunikasi sangat berhubungan dengan strategi politik. Strategi komunikasi akan membawa keuntungan bagi seseorang. Menurut Middleton (1980)

strategi komunikasi merupakan kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, media (saluran), penerima sampai pada pengaruh atau efek yang dirancang demi terwujudnya tujuan yang optimal. (Cangara, 2014, p. 236). Graber (1984:137) menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan, struktur serta faktor lingkungan yang berpengaruh dalam kehidupan politik. (Arifin, 2011, p. 12) Citra politik merupakan efek dari komunikasi politik. Citra politik dapat diartikan sebagai gambaran seseorang terhadap politik (meliputi kewenangan, kekuasaan, otoritas, kerjasama, konflik dan konsekuensi) hal ini berarti bahwa seringkali tidak sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik terbentuk dari persepsi tentang gejala politik yang memiliki makna kepercayaan, nilai, dan harapan dalam pendapat pribadi yang kemudian meluas menjadi opini publik.

Terdapat empat fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana politik, sebagai sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik. (Budiardjo, 2013, p. 405) Sehingga semakin banyak strategi partai akan membuat partai menjadi kuat sehingga akan mendapatkan dukungan massa yang lebih banyak. Dukungan massa sangat berpengaruh dalam kekuatan partai dan mempertahankan eksistensi partai itu sendiri. Citra dan opini publik sangat berpengaruh dalam mendapatkan dan mempertahankan dukungan massa. Setiap partai politik memiliki strategi sendiri dalam menghadapi hal tersebut.

Partai Persatuan Indonesia yang berada di Kabupaten Ponorogo menjadi sorotan penulis yang dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini. Partai Perindo hadir untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan Negara demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan yakni keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara murni partai Perindo menegakkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai Perindo merupakan suatu partai politik yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya. Sebagai partai politik yang baru di Kabupaten Ponorogo, tentunya Perindo memiliki strategi politik untuk mendapatkan dukungan melalui berbagai program partai yang fokus kepada masyarakat sebagai wujud nyata dari partai.

Sudah seharusnya partai memiliki strategi untuk mendapatkan massa yang terfokus untuk kemenangan partai politik, dengan cara pengorganisasian dan konsolidasi kader, menggunakan sayap partai secara maksimal, penguasaan dalam lingkungan politiknya, dan lain sebagainya. Pengaruh dan kekuasaan merupakan pendorong utama dalam prinsip kemenangan partai politik. Strategi dan partai politik merupakan hal yang cukup menarik, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul **“STRATEGI OFENSIF PARTAI PERSATUAN INDONESIA DALAM MENDAPATKAN DUKUNGAN MASSA”** Studi di DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi ofensif partai Persatuan Indonesia untuk mendapatkan dukungan massa ?”

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih terperinci dan tepat sasaran maka berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui strategi ofensif partai Persatuan Indonesia untuk mendapatkan dukungan massa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktik

a. Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan serta informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan peran partai politik dalam mendapatkan dukungan massa, dan pelaksanaan strategi-strategi partai.

b. Instansi terkait

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kekuatan partai politik dalam mendapatkan dukungan massa di Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai sarana penghubung antara instansi dengan lembaga pendidikan.

c. Mahasiswa

1. Sebagai evaluasi terhadap pemahaman materi dan teori yang diterima selama ini.
 2. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang dijelaskan. Bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam pembuatan skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau kajian bagi para pembaca yang ingin mengetahui atau melakukan penelitian yang sama mengenai strategi ofensif partai Persatuan Indonesia untuk mendapatkan dukungan massa di Kabupaten Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Dalam mempermudah tercapainya tujuan penelitian, peneliti memerlukan penegasan istilah untuk setiap point-point dari judul penelitian ini. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda untuk arti kata dari judul penelitian ini, sehingga menimbulkan arti bias dari maksud yang sebenarnya untuk penelitian ini.

1. Strategi Ofensif

Strategi ofensif sangat diperlukan saat partai akan meningkatkan jumlah pemilihnya atau jika eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Strategis ofensif digunakan dalam penerapan kebijakan tentunya harus memiliki perbedaan terhadap situasi yang berlaku saat itu serta menyoroti keuntungan-keuntungan yang diharapkan. (Schroder, 2010, p. 185)

2. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya. (Budiardjo, 2013, p. 403)

3. Dukungan Massa

Dukungan massa berasal dari dua kata, yaitu dukungan dan massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dukungan merupakan sesuatu sokongan atau bantuan. Sedangkan massa merupakan sekumpulan orang banyak (berkumpul disuatu tempat atau tersebar). (Nasional, 2012, p. 346&885)

4. Partai Persatuan Indonesia

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merupakan partai yang berasaskan Pancasila, dengan mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan Negara demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Perindo hadir untuk menegakkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Perindo, 2014, pp. 1-2)

F. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan adanya kerangka dasar teori yang digunakan sebagai pembuktian secara teoritis. Pembuktian penelitian ini berupa teoritis menurut beberapa pakar atau ahli terhadap variabel yang diteliti. Landasan teori ini akan memuat tentang teori yang berhubungan dengan judul dan fokus penelitian.

1. Pengertian Strategi Politik

Strategi merupakan seni yang berhubungan dengan kemampuan inteligensi atau pikiran untuk melibatkan semua sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dan efisien. (Cangara, 2014, p. 236) Strategi sering digunakan dalam militer, sedikit demi sedikit konsep strategi menyebar ke berbagai aspek di masyarakat tentu dalam bidang politik. Tujuan politik untuk memimpin kelompok-kelompok besar yang ada di masyarakat dan anggota partai politik serta organisasi dengan arah sasaran khusus. Dengan perencanaan strategi politik, maka akan mengetahui apa yang tersembunyi di balik tujuan akhir sebuah kemenangan pemilu bahkan akan mengetahui apa yang direncanakan dengan diberlakukannya peraturan baru. Adapun tujuan strategi politik, antara lain : perlombaan untuk memperkaya diri, pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan, atau perjuangan untuk mencapai tujuan tersembunyi. (Schroder, 2010, p. 21)

a. Jenis Strategi

Menurut Peter Schroder untuk mendapatkan target yang tepat, tentunya harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi. Secara umum terdapat 2 jenis strategi, yaitu strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan). (Schroder, 2010, p. 185)

Strategi Ofensif	Strategi Defensif
Strategi memperluas pasar (strategi persaingan)	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, strategi multiplikator)
Strategi menembus pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup/menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar)

1. Strategi Ofensif

Strategi ofensif dibutuhkan saat partai akan menambah jumlah pemilihnya atau jika eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Strategi ofensif merupakan “strategi memperluas pasar” dan “strategi menembus pasar”. Strategi ofensif digunakan pada kampanye pemilu yang harus menunjukkan perbedaan secara jelas dan menarik antara partai tersebut dengan partai lain yang nantinya kelompok pemilihnya akan direbut. Strategis ofensif diperlukan saat penerapan kebijakan dengan menjalankan dan menampilkan perbedaan dengan partai lain sesuai keadaan yang berlaku saat itu serta harus memperhatikan dan mengamati keuntungan-keuntungan sesuai yang harapan partai. (Schroder, 2010, p. 185)

➤ Strategi Memperluas Pasar

a. Dalam Kampanye Pemilu

Strategi ofensif saat pemilu memiliki tujuan untuk menciptakan kelompok baru disamping pemilih tetap yang telah ada. Sehingga harus memiliki penawaran baru yang dapat menarik pemilih baru yang selama ini memilih partai lain. Dimaksudkan bahwa strategi persaingan yang faktual, sehingga partai bertarung dengan segmen kelompok pemilih dalam kompetisi. Strategi ofensif merupakan kampanye pengantar yang dapat digunakan sebagai penawaran baru dan lebih baik dibanding partai yang lain. dalam menyusun penawaran baru sangat baik dengan memanfaatkan

perubahan nilai atau struktur yang terjadi di masyarakat di saat itu. Perluasan pasar harus melihat keadaan dan fenomena yang tersaat itu.

Ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan dan konsekuensinya harus dipertimbangkan oleh partai sendiri, sebagai berikut:

1. Platform partai harus disertai dan melengkapi program baru.
2. Bersamaan dengan ditampilkannya program-program yang baru, profil partai juga akan berubah. Sehingga profil baru harus tetap dan dapat diterima oleh pemilih lama, dengan bertambahnya jumlah pemilih baru tidak hilangnya pemilih lama atau jumlah pemilih semua semakin berkurang dari jumlah semula.
3. Orang-orang tertentu harus selaras dengan program tertentu serta harus menampilkan keserasan dengan program dan individu.
4. Isu atau program baru tidak dapat muncul dengan tiba-tiba. Sebelumnya para pemegang jabatan atau wakil rakyat yang terpilih harus sudah dipersiapkan melalui program pengembangan SDM.

Kampanye digunakan untuk memberi peluang dan menambah anggota baru. Sehingga organisasi harus siap menghadapi kelompok baru yang tentunya harus dijaga dan dirawat serta mampu berprestasi. Untuk itu, partai politik harus melakukan investasi di, bidang pengembangan pribadi (pelatihan dan pembinaan), bidang humas (*publik relation*). dan program bidang pengembangan. (Schroder, 2010, p. 187)

b. Dalam Penerapan Kebijakan

Dalam menerapkan kebijakan harus menawarkan produk baru atau kebijakan baru yang dapat memberikan hasil dari kebijakan tersebut harus dipropaganda. Adapun langkah pertama, kebijakan dirumuskan dengan jelas. Kebijakan yang belum selesai merupakan jenis produk yang kurang menarik. Eksekutif sering kali bertindak karena produk dan keuntungan yang ditawarkannya tidak dirumuskan dengan jelas, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti. Sehingga sebelum dilaksanakan harus dilakukan pekerjaan kehumasan yang cukup.

Banyak implementasi politik yang tidak berjalan sesuai harapan, baik pemerintah maupun organisasi lain. Contoh, berbagai upaya privatisasi yang gagal, strategi IMF yang gagal dalam mengurangi angka kemiskinan. Implementasi yang tidak lengkap dan harus diteliti sebagai akibat munculnya perlawanan.

Perluasan pasar harus melakukan inovasi produk baru atau kebijakan yang baru. Produk atau kebijakan harus dikemas dengan inovasi baru dengan nama baru serta diberikan penjelasan tentang keuntungan manfaat yang baru. Pertentangan atau konflik internal harus diselesaikan sejauh mungkin sebelum pelaksanaan kampanye terbuka yang berhubungan dengan kebijakan atau produk partai. Ada peran penting dalam perluasan pasar apakah orang atau sasaran yang dituju paham dan mengerti tentang tawaran yang diberikan dan mengetahui keuntungannya. Kekurangan kualitas sering terjadi dalam perluasan pasar, baik di partai maupun pemerintahan. Sering terjadi tawaran yang menentang konsep lama tanpa memperhatikan bagaimana tawaran baru dapat memberikan pengaruh kepada sasaran. Diharapkan aktor politik menyalurkan program yang berkualitas dengan menggunakan manajemen kualitas yang baik. (Schroder, 2010, p. 188)

➤ Strategi Menembus Pasar

Strategi menembus pasar merupakan menggali sumber daya atau potensi yang sudah ada dengan maksimal atau menggali bagian yang dimiliki oleh kelompok target yang mana keberhasilan telah didapat sebelumnya. Target yang menjadi sasaran contohnya perolehan hasil yang didapat dari kelompok target dengan jumlah yang lebih dengan hasil 30% dahulu dan 50% sekarang. Ini sangat berkaitan dengan pemasaran program dengan maksimal dan peningkatan kekompakan antar kelompok dan individu, seperti memperbesar tekanan terhadap kelompok target. Bagi organisasi, ini berarti:

1. Meningkatkan motivasi multiplikator dan pemegang jabatan dengan cara pemasaran serta keuntungan yang diperoleh.

2. Memanfaatkan jalur komunikasi yang baru.
3. Diadakannya pelatihan dan pembinaan supaya “para penjual” mempunyai keahlian yang baik untuk menyakinkan “para pembeli”.
4. Pergerakan emosi untuk kelompok target yang memanfaatkan situasi dengan membuat “musuh eksternal”.

2. Strategi Defensif

Strategi defensif akan terjadi jika partai pemerintah atau koalisi pemerintah terdiri dari partai yang ingin mempertahankan mayoritasnya. Selain itu, strategi defensif akan terjadi jika pasar tidak dipertahankan lebih lanjut atau ditutup, penutupan pasar ini diharapkan akan membawa keuntungan. (Schroder, 2010, p. 189)

➤ Strategi Mempertahankan Pasar

Strategi ini sering digunakan pemerintah untuk mempertahankan mayoritasnya, dengan cara partai pemerintah akan menjaga pemilih tetap dan memperkuat pemahaman pemilih musiman yang belum memilih partai pemerintah. Jika partai oposisi akan menyerang, tentunya partai pemerintah akan menghilangkan perbedaan serta akan menciptakan perbedaan yang tidak dapat dikenali. Partai-partai yang menonjolkan perbedaan yang memberikan tawaran menarik, sebaliknya partai yang menggunakan strategi defensif akan membuat perbedaan dengan parati yang lain sehingga sulit dikenali.

➤ Strategi Melepas atau Menyerang Pasar

Strategi melepas pasar terdiri dari 2 arti. Pertama, partai akan mengundurkan diri dan di keadaan tertentu akan bergabung dengan partai lain. Kedua, di pemilu yang menggunakan surat suara ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya diikuti oleh kandidat terkuat dalam pemilu tahap pertama. Penyerahan pasar semnetara waktu kepada pihak ketiga merupakan sebuah langkah yang sangat sering terjadi.

Contohnya, jika 2 minggu setelah pemungutan suara putaran pertama diadakan pemungutan suara putaran kedua, dimana pemungutan suara kedua hanya boleh diikuti oleh kandidat yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemungutan suara pertama. Maka kandidat lain diharapkan pada pertanyaan

:strategi apa yang akan diterapkan dalam 14 hari kedepan ?. Hal ini tidak dapat menggunakan strategi ofensif dan tidak ada pasar yang dapat dipertahankan. Jika kandidat terpaksa memberikan pasar, mereka harus tegas dalam ketidak-ikutsertaan mereka dengan memberikan alasan mendasar dan mengusulkan pilihan lain kepada pemilih mereka. Dalam situasi ini terdapat strategi yang dapat digunakan untuk memberi tawaran kepada kandidat lain, ada beberapa persyaratan untuk diajukan kepada kandidat yang akan menerima pasar akan bervariasi dari konsesi politik sampai pembagian kekuasaan. Dalam setiap perubahan sudah sepantasnya disertai kampanye informasi untuk para multiplikator.

Jika ada keputusan untuk menutup pasar, misalnya pengalihan anggota, menjual sumber daya yang masih ada dan membenahan atau menyerahkan organisasi tentunya harus direncanakan dengan strategis. Keadaan atau situasi akan mempengaruhi penutupan pasar. Pemerintah dalam semua tingkatan memutuskan untuk menarik diri dari sebuah kegiatan yang semula dilakukan oleh negara. Realita yang sulit dihindari adalah korupsi untuk mendapatkan jumlah keuntungan yang sangat besar di proses privatisasi yang menjelaskan tidak ada perencanaan strategis dalam tahap-tahap imlementasinya, sehingga berdampak seluruh proses menjadi tidak berjalan sesuai harapan. Privatisasi tidak hanya menjual atau menyerahkan aktivitas semata, tetapi menyerahkan pasar atau sebagian pasar yang membutuhkan perencanaan dengan strategis dan menggunakan peraturan-peraturan tertentu.

b. Implementasi Strategi

Terjadinya implementasi strategi melalui partisipasi aktif dalam melaksanakan aktivitas dan program. Sehingga kesuksesan implementasi tergantung pada pihak atau orang yang bertanggungjawab dalam tugas, terdapat dua faktor yang mempengaruhi implementasi strategi yaitu faktor manusia dan operasional memegang peranan penting. (Schroder, 2010, p. 394)

1. Faktor Manusia

- Kepemimpinan politik

Pimpinan politik harus melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, pimpinan politik terlepas apakah dia menteri, pemerintah, pimpinan lembaga masyarakat, ataupun pimpinan partai. Pimpinan politik memiliki tanggungjawab untuk program, pemilihan kandidat, pembuatan rencana anggaran dan menyetujui kebijakan. Apabila aturan atau ketetapan telah disepakati, seharusnya pimpinan politik tidak ikut campur dalam manajemen kampanye, kecuali pimpinan kampanye membutuhkan konsultasi dengan pimpinan politik yang berkaitan dengan keputusan penting yang dibuat.

Manajer kampanye ditunjuk oleh pimpinan politik yang harus bekerja secara profesional. Dalam mengambil keputusan harus diputuskan bersama, tidak boleh seorang diri. Ikut campur dalam mengambil keputusan tidak saja terjadi dalam kampanye pemilu, tetapi juga dalam strategi politik lainnya. Hal ini memberikan dampak menurunkan moral manajer kampanye serta menurunnya kepercayaan diri pekerja partai dalam proses kampanye. Sehingga pimpinan politik harus melakukan prinsip dengan bekerja secara penuh dan tepat waktu, serta tidak dianjurkan ikut campur untuk pekerjaan manajemen kampanye secara mendalam. Dalam memilih manajer kampanye, pimpinan politik harus dengan seksama dan cermat, dengan kualitas tinggi menjadi pertimbangan ketika memutuskan. Tentunya harus menghindari pengangkatan secara politis atau dilatarbelakangi oleh sifat pribadi.

➤ Manajer kampanye pemilu

Ada beberapa kualifikasi dalam menjadi manajer pemilu, antara lain :

1. Mampu berpikir dan mengambil keputusan dengan strategis dan politik.
2. Mampu mewujudkan rencana-rencana yang sudah ditetapkan dan diterapkan dalam praktik secara efektif.
3. Mampu memberi motivasi dan mampu mengelola organisasi, anggota dan seksi organisasi yang berada dibawahnya.

Untuk memenuhi kriteria tersebut, manajer kampanye harus mempunyai kualitas terbaik, sehingga mampu mengambil keputusan.

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan kampanye, antara lain : kebijaksanaan, keberanian, kesabaran, pragmatisme, dan ketulusan.

➤ Aktivistis

Aktivis merupakan anggota partai yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan atau program partai, diharapkan memberikan manfaat yang besar, tidak terbatas dalam pemanfaatan kegiatan. Yang termasuk aktivis yang menjadi tulang punggung partai adalah anggota partai, sukarelawan pendukung kampanye dan fungsionaris tingkat bawah yang berhubungan dan bekerja langsung dengan kelompok target. Untuk menilai pengaruh atau dampak pada kebijakan yang dilakukan harus melihat :

1. Kuantitas

Jumlah pendukung yang aktif tentunya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah kampanye.

2. Kualitas

Komunikasi tatap muka secara interaktif tidak akan berhasil jika para pendukung tidak terlatih dan siap menjalankan tugasnya. Sangatlah penting memberi perhatian khusus untuk mengorganisir para aktivis dengan unit-unit mereka. Setiap unit harus disiplin dengan tugas-tugas mereka.

3. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi internal, yang harus menjamin bahwa informasi dari tingkat atas bisa sampai kebawah, tetapi juga jalur proses umpan balik dari bawah ke atas. Harus dipastikan bahwa mereka harus senantiasa bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara tepat waktu. Dalam menjalankan strategi politik, harus dapat mengamati dalam situasi yang kurang menyenangkan, pimpinan seringkali ikut mencari informasi atau tiba-tiba memutus komunikasi tanpa informasi bahkan memberikan informasi yang salah. Sikap ini akan berpengaruh terhadap unit yang

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang bergantung pada informasi.

4. Moral

Keyakinan optimisme untuk menang dan moral tim menentukan keberhasilan dalam memimpin aktivis.

➤ Motivasi sukarelawan

Adapun penghambat motivasi yang mungkin timbul akibat kepemimpinan yang tidak sholid, antara lain :

1. Kurangnya sasaran-sasaran yang realistis yang sesuai dengan tujuan anggota.
2. Kurangnya komunikasi internal.
3. Beban terlalu banyak atau beban terlalu sedikit.
4. Permainan kekuasaan.
5. Tidak diperhatikannya kompetensi tenaga relawan.
6. Hilangnya minat pihak pimpinan.

2. Faktor Operasional

➤ Prinsip desakan waktu

Prinsip kecepatan menjadi prioritas, jika perencanaan berlarut-larut akan mengakibatkan terhambatnya tindakan-tindakan yang dilakukan dan mengakibatkan perencanaan bocor ke publik. Keberhasilan pelaksanaan juga sangat tergantung dengan ketepatan waktu yang dipilih. Pemilihan waktu harus dikoordinasikan dengan kegiatan-kegiatan lain yang telah direncanakan dan harus selaras dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh unit-unit taktis lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan adalah mengikuti arus tren. Jika berhasil mengikuti arus tren yang menarik dan membawa ke arah positif, bisa dipastikan kita menghemat sumberdaya yang cukup besar.

Satu hal yang harus dihindari adalah menunda waktu pelaksanaan kampanye, atau lamanya masa tunggu untuk memulai sebuah tindakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah memusatkan perhatian pada kerangka waktu yang telah ditentukan dan pencapaian sasaran dalam jangka waktu

yang ditetapkan. Jika terjadi penundaan yang lama untuk pelaksanaan rencana, bisa dipastikan akan mengalami keletihan dari aktivis dan organisasi.

➤ Prinsip penyesuaian yang fleksibel

Fleksibilitas adalah pengenalan dan pemahaman yang lebih baik atas tantangan maupun peluang dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi ini. Dengan kata lain bahwa fleksibilitas merupakan cara yang halus untuk menyesuaikan pelaksanaan kampanye dengan kondisi lokal untuk mencapai tujuan yang besar dalam waktu yang telah ditetapkan. Unsur lain untuk penyesuaian menggunakan langkah inovasi dalam pelaksanaan. Dengan inovasi tentunya membuat lawan kita tidak bisa memprediksi trik dan taktik kita dalam melaksanakan program.

➤ Prinsip ilusi

Tipuan ilusi digunakan untuk memperoleh keuntungan strategis. Tipuan ilusi digunakan untuk mengalihkan perhatian lawan dari bidang tertentu yang tidak menguntungkan kita. Prinsip ini dilakukan supaya lawan memperkuat ditempat tertentu dan terfokus satu titik, sehingga yang akan mempermudah kita untuk menyerang dititik lain.

2. Dukungan Massa Bagi Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya. (Budiardjo, 2013, p. 403)

Partai politik merupakan organisasi bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warna negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan cita-cita serta kehendak untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, rakyat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)

Setiap negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan model dua partai atau multipartai memiliki undang-undang kepartaian. Di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang mengalami perbahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan partai politik, tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban partai politik.

a. Syarat Pembentukan Partai Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 2 dinyatakan bahwa syarat pembentukan partai politik di Indonesia. Berikut ini kutipannya:

1. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia dengan usia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
2. Partai politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.
3. Pendiri dan pengurus partai politik tidak boleh merangkap sebagai anggota partai politik lain.

b. Tujuan Partai Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 10 dinyatakan bahwa tujuan partai politik di Indonesia adalah berikut ini kutipannya :

1. Tujuan umum partai politik
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Menjaga dan memelihara ketuhanan NKRI
2. Tujuan khusus partai politik
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik serta pemerintahan.

c. Fungsi, Hak, Dan Kewajiban Partai Politik

Partai politik memiliki tujuan dan cita-cita, mereka tidak hanya mempengaruhi kebijakan publik, tetapi juga mengarahkan serta mengendalikan kebijakan-kebijakan melalui keterwakilan anggotanya yang berada di jabatan publik. Semestinya partai politik memiliki fungsi tertentu di pemerintahan yang bersifat demokratis.

Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2013, p. 405) menjelaskan tentang fungsi partai politik dalam negara demokrasi adalah :

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga arus informasi menjadi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Partai politik memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, sering disebut dengan perantara antara pemerintah dengan rakyat.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan proses melaluinya orang dalam masyarakat tertentu yang belajar mengenai sistem politiknya. Dalam proses ini sedikit banyak menentukan persepsi serta reaksi mereka terhadap fenomena politik. Disisi lain, sosialisasi politik digunakan untuk menciptakan citra (*image*) bahwa politik juga memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini penting untuk dilakukan karena tujuan partai adalah menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilu. Partai politik harus memperoleh kedudukan seluas mungkin dan partai kepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partai.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah kepemimpinan, kepemimpinan tingkat internal partai sampai tingkat nasional. Untuk kepentingan internal, partai membutuhkan kader-kader partai yang berkualitas sehingga partai mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri. Rekrutmen politik melibatkan golongan-golongan buruh, petani,

pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya untuk memperluas kesempatan berpartisipasi politik.

4. Sebagai sarana pengaturan konflik

Masyarakat Indonesia bersifat heterogen, yang terdiri dari berbagai etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi ataupun agaman. Sehingga potensi terjadinya konflik pertentangan sangat mudah. Disinilah peran partai politik untuk membantu mengatasi dan menekan tindakan negatif. Elite partai akan menumbuhkan pengertian bahwa diantara mereka memiliki kedudukan yang sama serta menyakinkan pendukungnya. Elite partai dalam politik adalah pemimpin partai. dengan kata lain partai politik merupakan penghubung psikologis dan organisasional antara rakyat dengan pemerintah. Partai melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntan yang berkembang di kelompok masyarakat, hal ini dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang berada di kursi legislatif.

Sedangkan fungsi, hak, dan kewajiban partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 pasal 11, 12 dan 13, berikut kutipannya :

1. Fungsi partai politik (pasal 11) yaitu sebagai sarana untuk :
 - a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
 - c. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
 - d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui manisme demokrasi yang harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Hak partai politik (pasal 12) :
 - a. Mendapatkan perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara.
 - b. Mengatur serta mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
 - c. Memperoleh hak cipta terkait nama, lambang, dan tanda gambar partai sesuai dengan perauran perundang-undangan.

- d. Ikut serta dalam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. Membentuk fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sesuai dengan perundang-undangan.
3. Kewajiban partai politik (pasal 13) :
- a. Mengamalkan Pancasila serta melaksanakan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI.
 - c. Ikut berpartisipasi dalam membangun nasional.
 - d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.
 - e. Melaksanakan pendidikan politik serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Makna Dukungan

Dukungan massa berasal dari dua kata, yaitu dukungan dan massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dukungan merupakan sesuatu sokongan atau bantuan. Sedangkan massa merupakan sekumpulan orang yang banyak sekali (berkumpul disuatu tempat atau tersebar). (Nasional, 2012, p. 346&884)

Partai politik biasanya memiliki satu bahkan beberapa kelompok massa. Kelompok massa ini memiliki kekuatan dalam perolehan suara dan selalu memilih suatu partai yang biasanya disebut dengan basis massa. Selain berbasis massa juga terdapat massa mengambang atau *floating mass*. Pilihan mereka sangat terganggu oleh faktor-faktor situasional sehingga mereka tidak loyal terhadap partai politik tertentu. (Nursal, 2004, p. 99)

Di negara demokrasi dalam basis massa cenderung berkurang, seiring dengan meningkatnya pemilih yang memilih berdasarkan tawaran isu, kandidat dan faktor situasional. Dalam berbagai kasus, keunggulan dalam partai atau kandidat ditentukan oleh massa yang tradisional bukan basis massa. Di negara berkembang pun basis massa tidaklah bersifat statis, dalam lingkup dukungan

terhadap partai bersifat fluktuatif. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan dan kesediaan partai untuk memperluas dan mempertahankan basis pendukungnya. Perluasan dukungan juga dapat menggunakan pendukung musiman atau potensial yang disebut dengan massa mengambang. Untuk memperluas dukungan, tidak jarang partai politik harus bergerak putar arah dari watak dasarnya ke suatu arah tertentu yang memungkinkan konstituen baru merasa terwakili. (Nursal, 2004, p. 100)

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan konsep maupun variabel agar dapat diukur dengan cara melihat indikator dari suatu konsep atau variabel. (Noor, 2011, p. 97) Definisi operasional dalam penelitian yang berjudul “Strategi Partai Politik Baru Dalam Mendapatkan Dukungan Massa Pada Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Ponorogo” adalah sebagai berikut : dengan melakukan observasi lapangan terkait dengan strategi partai Perindo untuk mendapatkan dukungan massa. Dilanjutkan dengan penggalian data dan wawancara kepada pengurus DPD partai Perindo dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan partai Perindo. Untuk mengetahui seberapa besar peran partai Perindo kepada masyarakat. Dalam mengukur strategi partai Perindo dalam mendapatkan dukungan massa ada salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat realita yang terjadi dilapangan. Dalam teori strategi politik diatas maka indikator yang digunakan yaitu :

1. Jenis strategi

Jenis strategi terdapat dua macam, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif merupakan strategi yang dapat meningkatkan jumlah pemilihnya. Strategi ofensif dilakukan dengan dua cara yaitu strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Strategi defensif merupakan strategi untuk mempertahankan mayoritasnya atau pemilihnya. Strategi defensif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mempertahankan pasar dan melepas atau menyerang pasar. (Schroder, 2010, p. 185) Berdasarkan pengertian diatas bahwa Partai Perindo cenderung menggunakan strategi ofensif. Karena Partai Perindo tergolong partai baru dan belum memiliki keterwakilannya di parlemen, sehingga Partai Perindo

harus memiliki strategi-strategi dengan tujuan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

2. Strategi Ofensif

Strategi ofensif merupakan strategi yang diterapkan saat kampanye pemilu dengan menampilkan kebijakan atau produk perbedaan dan menarik daripada partai lain sehingga pemilih akan tertarik dan memberikan keuntungan. Kebijakan yang dijual harus melihat keadaan pada saat itu dan menyoroti keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Secara konsep strategi ofensif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Strategi Memperluas Pasar

Strategi memperluas pasar digunakan dalam kampanye pemilu dan penerapan kebijakan. Strategi memperluas pasar yang ofensif dalam pemilu bertujuan membentuk kelompok pemilih baru disamping pemilih tradisional (tetap). Strategi ini digunakan untuk menjelaskan penawaran baru yang lebih baik dibandingkan dengan partai politik lainnya. Penawaran baru tersebut harus bisa memanfaatkan dari perubahan nilai atau perubahan struktur yang terjadi di masyarakat, sehingga perluasan pasar tidak mungkin tercapai dengan mengangkat isu-isu yang tidak laku dijual. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan menerima konsekuensi. Adapun persyaratannya yaitu: platform harus dilengkapi dengan program baru, profil partai yang baru yang dapat diterima, orang-orang tertentu harus selaras dengan program dan individu dan pemegang jabatan atau wakil rakyat harus mempersiapkan diri melalui program pengembangan SDM untuk menghadapi isu dan program baru.

Dalam penerapan kebijakan harus menawarkan produk atau kebijakan baru yang akan menghasilkan keuntungan untuk partai. Perluasan pasar tidak mungkin akan menjual produk lama dengan kemasan baru. Produk atau kebijakan yang sudah di pasarkan sejak lama dan belum berhasil dijalankan atau gagal, tidak dapat dijual dengan nama yang sama. Produk tersebut harus dikemas dengan bungkus yang baru dan nama yang baru. (Schroder, 2010, p. 186)

b. Strategi Menembus Pasar

Strategi menembus pasar merupakan penggalian potensi yang sudah ada secara maksimal, atau penggalian bagian yang dimiliki oleh kelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Sasaran yang ditargetkan seperti memperoleh hasil yang lebih baik dari hasil sebelumnya dari kelompok target, misalnya dahulu mendapatkan dukungan 30%, sekarang 50%. Hal ini sangat berpengaruh dalam pemasaran program secara baik dan peningkatan keselarasan antara program dan individu, seperti meningkatkan tekanan terhadap kelompok target. (Schroder, 2010, p. 188)

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya tindakan, motivasi, perilaku, persepsi dll. Dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang menggunakan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif karena menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah dikarenakan berhadapan langsung dengan kenyataan. Kedua yaitu metode kualitatif menyajikan hubungan langsung antara peneliti dengan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka serta lebih menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2013)

Penelitian ini merupakan penelitian yang bermaksud untuk menyimpulkan informasi mengenai segala sesuatu yang ada. Yaitu gejala yang dialami peneliti selama melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan segala sesuatu atau gambaran secara kompleks yang telah terjadi. Sehingga dalam penelitian ini menyajiakn deskripsi mengenai strategi partai politik baru dalam mendapatkan dukungan massa.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelii untuk melakukan suatu data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dewan

Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia terletak di jalan Jendral Sudirman No. 5 Krajan, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan orang pada latar penelitian. Informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi penelitian. Sehingga informan harus memiliki banyak pengalaman dan harus sukrela untuk menjadi anggota tim penelitian. (Moleong, 2013, p. 132) Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk mengkaji fenomena tertentu terkait informan yang akan dipilih dan menjawab terkait semua permasalahan berkaitan dengan penelitian. (Noor, 2011, p. 155)

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian tentang strategi ofensif partai Persatuan Indonesia dalam mendapatkan dukungan massa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data hasil penelitian secara relevan, aktual dan faktual. Dibutuhkan informan sebagai berikut :

1. Ketua DPD Partai Perindo : 1 orang
2. Sekretaris DPD Partai Perindo : 1 orang
3. Penerima Gerobak Gratis : 1 orang
4. Peserta Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro : 1 orang
5. Penerima Bantuan Usaha : 1 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan yang diwawancarai dan memberikan pertanyaan. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses untuk memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara

bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dengan informan atau orang diwawancarai (*interviewee*). (Noor, 2011, p. 139)

b. Observasi

Observasi menuntut adanya pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan menggunakan teknik observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistis perilaku, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi terhadap aspek tertentu dalam umpan balik terhadap pengukur tersebut. (Noor, 2011, p. 140)

c. Dokumen

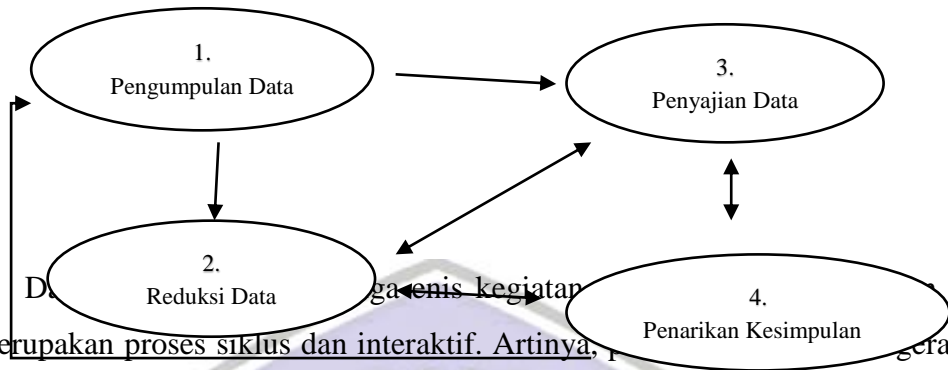
Dokumen merupakan bahan tertulis ataupun film yang digunakan untuk keperluan penelitian sebagai sumber data karena didalamnya terdapat banyak hal yang dapat dijadikan sumber data untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. (Moleong, 2013, p. 217) Dokumen dalam hal ini adalah dokumen-dokumen yang terkait tentang Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Ponorogo, data tersebut berupa buku AD, ART, buku saku anggota partai dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Menurut Bogdan Biklen, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja pada data, mengorganisasikan data serta memilah-milah data yang nantinya akan dikelola, mensistensikan, mencari dan mengemukakan pola yang penting dan dipelajari yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2013, p. 248)

Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang akan dilaporkan secara sistematis. Model analisis dalam data ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif tersebut terdiri dari 3 hal, antara lain : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum. (Miles dan Huberman, 1994). Berikut ini merupakan gambaran model interaktif :

Gambar 1.1
Skema analisis data penelitian



ini merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya, gerak di

antar 4 sumbu tersebut, yaitu proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan. Sehingga analisis ini akan berlangsung dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan akan berhenti setelah penulisan akhir penelitian siap dilakukan. Berikut ini adalah penjabaran dari gambar diatas :

1. Tahap pengumpulan data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. (Idrus, 2009, p. 148)

2. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data adalah salah satu kegiatan analisis sehingga pilihan peneliti tentang bagian data yang diperlukan, dihapus, pola-pola yang digunakan untuk meringkas sejumlah bagian, proses reduksi digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menghapus bagian data yang tidak digunakan sehingga akan mempermudah penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilakukan proses verifikasi. (Idrus, 2009, p. 150)

3. Penyajian data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari tindakan. Dengan mencermati penyajian data, maka peneliti akan mudah memahami apa yang telah terjadi dan apa yang harus dilakukan. Berarti peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba mengambil tindakan dengan memperdalam temuan. (Idrus, 2009, p. 151)

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan penarikan arti data yang telah ditampilkan. Ada beberapa cara dalam proses ini antara lain melakukan pencatatan pola dan tema yang sama, pengelompokan serta pencarian kasus-kasus negatif (meliputi kasus khas, berbeda, menyimpang dari kebiasaan) (Idrus, 2009, p. 151)

Dari penjelasan diatas dalam menganalisis data yang didapat melalui pengumpulan data, kemudian penulis menganalisis data yang didapat dari lapangan dnega menggunakan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara berfikir induktif yang dimulai dari analisis sebagai data dalam penelitian yang mengarah pada kesimpulan.

